

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media sosial berperan menjadi kekuatan utama sebagai transformasi komunikasi masyarakat saat ini. Bagi pemerintah, media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana publikasi informasi, tetapi juga menjadi medium komunikasi publik yang memungkinkan penyampaian kebijakan, program, dan aktivitas pemerintahan secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara media konvensional seperti televisi atau surat kabar. Penggunaan media sosial sebagai saluran resmi informasi pemerintah menawarkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kanal masyarakat terhadap informasi publik merupakan hak yang dijamin oleh negara, di mana keterbukaan informasi dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan.

Perkembangan teknologi digital juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan komunikasi publik melalui media sosial sebagai bagian dari implementasi *e-government*. Media sosial menjadi sarana yang memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi secara pesat ke audiens yang lebih luas, dan dapat membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat (Duhan, 2020). Dalam perspektif *e-government*, pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan (Novchi et al., 2022). Media sosial pemerintah bahkan dipandang menjadi salah satu faktor

penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi, kolaborasi, serta partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan modern (Mergel, 2013 dalam Nugraha et al., 2024).

Pemerintah Kota Banjarmasin turut mengoptimalkan pemanfaatan media sosial, khususnya Instagram resmi @pemko_banjarmasin, sebagai kanal komunikasi publik. Akun tersebut aktif membagikan berbagai informasi mengenai kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta aktivitas kepala daerah. Hingga Maret 2025, akun ini telah memiliki lebih dari 5.607 unggahan dan lebih dari 20 ribu pengikut. Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia semakin memperkuat posisi Instagram sebagai medium strategis komunikasi pemerintah. Laporan Digital 2025 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 143 juta identitas pengguna media sosial, sementara Instagram menjadi salah satu platform yang mendominasi penggunaan media sosial di Indonesia (We Are Social & Meltwater, 2025). Kondisi ini menjadikan Instagram sebagai media yang efektif untuk menyampaikan informasi publik secara cepat, visual, dan interaktif.

Namun, besarnya pemanfaatan media sosial pemerintah juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam praktik komunikasi publik digital. Pemerintah tidak hanya dituntut aktif memproduksi konten, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Pada Februari 2025, Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyatakan bahwa media sosial pemerintah harus digunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat dan bukan sebagai alat pencitraan pemerintah (Kompas.com, 2025). Pernyataan tersebut

menunjukkan bahwa pengelolaan media sosial pemerintah perlu memperhatikan substansi informasi yang disampaikan kepada publik. Media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, melainkan juga memperlihatkan isu apa yang dianggap penting, aktor siapa yang paling sering ditampilkan, serta orientasi komunikasi yang dibangun dalam ruang digital. Penelitian Nugraha et al. (2024) menunjukkan bahwa instansi pemerintah memiliki strategi komunikasi yang berbeda dalam memanfaatkan Instagram, bahkan sebagian instansi cenderung mengedepankan figur pimpinan dibandingkan informasi publik.

Untuk memahami kecenderungan komunikasi tersebut, diperlukan analisis isi terhadap unggahan media sosial pemerintah. Analisis isi memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan kecenderungan narasi yang muncul dalam komunikasi digital pemerintah. Dalam penelitian ini, kecenderungan narasi akan dilihat melalui beberapa kategori, yaitu tema isi unggahan, aktor dominan yang ditampilkan, fungsi pesan, orientasi narasi, format unggahan, serta adanya ajakan kepada publik. Kategori-kategori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah mengonstruksi komunikasi publiknya di media sosial. Frekuensi kemunculan kategori tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik, melainkan sebagai alat bantu interpretasi untuk memperlihatkan kecenderungan narasi yang muncul dalam unggahan akun pemerintah.

Kajian mengenai media sosial pemerintah telah banyak dilakukan, meskipun demikian sebagian besar studi terdahulu cenderung mengkaji komunikasi digital pemerintah, *e-government*, komunikasi dua arah, maupun komunikasi pembangunan (Dunan, 2020). Penelitian Nugraha et al. (2024) telah menganalisis isi konten Instagram pada kementerian dan lembaga pemerintah di

tingkat nasional, sedangkan Sumarwan et al. (2024) mengkaji Instagram sebagai media komunikasi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus memetakan kecenderungan isi narasi akun Instagram pemerintah daerah berdasarkan tema, fungsi pesan, aktor dominan, orientasi narasi, format unggahan, dan ajakan kepada publik masih relatif terbatas, terutama pada konteks pemerintah daerah. Hingga saat ini, kajian yang secara spesifik mengkaji akun Instagram resmi Pemerintah Kota Banjarmasin (@pemko_banjarmasin) menggunakan pendekatan analisis isi masih relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, penelitian ini perlu dilakukan guna memahami bagaimana Pemerintah Kota Banjarmasin memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Analisis isi penting dilakukan karena akun media sosial pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperlihatkan prioritas komunikasi pemerintah melalui jenis konten yang paling sering dipublikasikan. Penelitian ini secara khusus mengkaji seluruh unggahan yang diproduksi langsung oleh akun Instagram @pemko_banjarmasin selama periode 1–14 Agustus 2025. Melalui analisis isi kualitatif, diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kecenderungan narasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam komunikasi digitalnya, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan komunikasi publik yang lebih informatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Kecenderungan Narasi Pada Akun Media Sosial Pemerintah Lokal Kota Banjarmasin (Analisis Isi Pada Akun Instagram @pemko_banjarmasin)”.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya melandasi perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana kecenderungan narasi pada unggahan akun Instagram @pemko_banjarmasin sebagai media komunikasi publik Pemerintah Kota Banjarmasin? “

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui kecenderungan narasi pada unggahan akun Instagram @pemko_banjarmasin sebagai media komunikasi publik Pemerintah Kota Banjarmasin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian dalam bidang ilmu komunikasi, terutama dalam memahami kecenderungan narasi yang dibangun pemerintah daerah melalui media sosial. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada literatur akademik terkait pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah sebagai wadah penyebaran informasi dan komunikasi publik pada era digital. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait kecenderungan narasi komunikasi pemerintah di media sosial, terutama melalui pendekatan analisis isi pada platform Instagram

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya unit humas atau pengelola

media sosial pemerintah, sebagai bahan evaluasi terhadap strategi komunikasi publik yang dijalankan pada akun Instagram @pemko_banjarmasin. Hasil penelitian ini dapat membantu melihat apakah konten yang dipublikasikan telah seimbang antara penyampaian informasi publik, pelayanan masyarakat, partisipasi publik, dan publikasi kegiatan pejabat atau pemerintah daerah.

